




Research Article

## Politik Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan Sebagai Wujud Kekuasaan Dalam Kebijakan Publik

Sya'roni<sup>1</sup>, Mulyadi<sup>2</sup>, Masduki Duryat<sup>3</sup>

1. Pascasarjana MPI UIN Siber Syekh Nur Jati Cirebon  
E-mail: [abangsyaroni@gmail.com](mailto:abangsyaroni@gmail.com) 
2. Pascasarjana MPI UIN Siber Syekh Nur Jati Cirebon  
E-mail: [masmoeiyadi79@gmail.com](mailto:masmoeiyadi79@gmail.com)
3. Pascasarjana MPI UIN Siber Syekh Nur Jati Cirebon  
E-mail: [masduki@uinssc.ac.id](mailto:masduki@uinssc.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2026  
Accepted : April 12, 2026

Revised : March 27, 2026  
Available online : May 18, 2026

**How to Cite:** Sya'roni, Mulyadi and Masduki Duryat (2026) "Politics in the Formulation of Educational Policy as a Form of Power in Public Policy", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2463–2480. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2244.

### Politics in the Formulation of Educational Policy as a Form of Power in Public Policy

**Abstract.** This paper is a qualitative study based on literature review that explores the political dynamics in the formulation of education policy as a manifestation of power in public policy. Education is not merely a technical-administrative process, but rather a strategic field where

ideological contestation, vested interests, and power hegemony take place. Employing a critical theoretical approach, particularly Michel Foucault's concept of power-knowledge relations and Antonio Gramsci's theory of hegemony, this study analyzes how education policies are designed, negotiated, and implemented within non-neutral power structures. The findings reveal that education policy often serves as a legitimizing tool for dominant power, shaping educational narratives, values, and practices aligned with elite interests. The political process involving state actors, political elites, bureaucracies, and international institutions plays a decisive role in directing the trajectory and content of national education policy. Thus, education policy is not merely a public policy product but also a mechanism of power to govern, discipline, and produce citizen-subjects according to specific ideological constructions. This study recommends the cultivation of critical awareness in reading education policymaking processes, so that the resulting policies truly uphold social justice, emancipation, and structural liberation.

**Keywords:** Education Politics, Public Policy, Power, Hegemony, Critical Theory, Power-Knowledge Relations.

**Abstrak.** Tulisan ini merupakan studi kualitatif berbasis studi pustaka yang membahas dinamika politik dalam proses perumusan kebijakan pendidikan sebagai manifestasi kekuasaan dalam kebijakan publik. Pendidikan dipahami bukan sekadar proses teknis-administratif, melainkan medan strategis tempat berlangsungnya kontestasi ideologi, kepentingan, dan hegemoni kekuasaan. Menggunakan pendekatan teori kritis, khususnya pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa-pengetahuan serta teori hegemoni Antonio Gramsci, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan dirancang, dinegosiasikan, dan dijalankan dalam kerangka struktur kekuasaan yang tidak netral. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sering kali menjadi alat legitimasi kekuasaan dominan, dengan membentuk narasi, nilai, dan praktik pendidikan yang selaras dengan kepentingan elit penguasa. Proses politik yang melibatkan aktor negara, elit politik, birokrasi, dan institusi internasional turut membentuk arah dan isi kebijakan pendidikan nasional. Dengan demikian, kebijakan pendidikan bukan hanya produk kebijakan publik, tetapi juga instrumen kekuasaan untuk mengatur, mengawasi, dan membentuk subjek warga negara sesuai dengan konstruksi ideologis tertentu. Studi ini merekomendasikan perlunya kesadaran kritis dalam membaca proses kebijakan pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada keadilan sosial, emansipasi, dan pembebasan struktural.

**Kata Kunci :** Politik Pendidikan, Kebijakan Publik, Kekuasaan, Hegemoni, Teori Kritis, Relasi Kuasa-Pengetahuan.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan struktur sosial dan politik suatu negara. Ia tidak hanya berperan sebagai sarana pengembangan kapasitas individu, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam membentuk identitas nasional, menanamkan nilai-nilai ideologis, serta mempertahankan stabilitas kekuasaan. Dalam konteks kebijakan publik, pendidikan menjadi ruang politik yang sangat strategis karena menyangkut masa depan generasi dan legitimasi ideologi yang dominan dalam masyarakat<sup>1</sup>. Oleh karena itu, penting

---

<sup>1</sup> Ball, S. J. (1994). *Education Reform: A Critical and Post-structural Approach*. Buckingham: Open University Press, hlm. 2-5.

untuk memahami bahwa kebijakan pendidikan tidak berdiri dalam ruang netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa yang kompleks antara aktor negara, elit politik, institusi internasional, dan kepentingan ekonomi global<sup>2</sup>.

Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan sering kali dirancang berdasarkan pertimbangan politik, baik dalam rangka pelestarian kekuasaan maupun sebagai strategi pengendalian sosial. Di Indonesia, hal ini dapat dilihat sejak era kolonial hingga pascareformasi. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan dirancang untuk mencetak tenaga kerja rendahan bagi kepentingan kolonial<sup>3</sup>. Pada era Orde Baru, pendidikan menjadi instrumen homogenisasi ideologi negara melalui kurikulum yang sentralistik dan pengendalian narasi sejarah nasional<sup>4</sup>. Sementara itu, pada masa reformasi hingga kini, liberalisasi pendidikan dan desentralisasi kebijakan membuka ruang bagi aktor-aktor non-negara dan pengaruh pasar global, yang tidak jarang menyebabkan fragmentasi kebijakan dan ketimpangan akses pendidikan<sup>5</sup>.

Dalam perspektif teori kritis, khususnya pemikiran Michel Foucault dan Antonio Gramsci, pendidikan tidak bisa dilepaskan dari analisis kekuasaan. Foucault mengemukakan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif—ia membentuk subjek melalui praktik diskursif, institusi, dan struktur pengetahuan<sup>6</sup>. Sekolah, dalam hal ini, bukan hanya tempat belajar, tetapi juga arena produksi subjek yang patuh terhadap norma-norma sosial dan ideologi yang berkuasa. Sebaliknya, Gramsci memandang pendidikan sebagai medan hegemoni, di mana kelas dominan menciptakan “persetujuan” sosial melalui institusi pendidikan, sehingga dominasi mereka tampak alamiah dan tidak dipertanyakan<sup>7</sup>. Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan ini menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan berfungsi sebagai alat hegemonik untuk mempertahankan struktur sosial yang ada, bukan semata demi pemerataan akses atau peningkatan kualitas.

Dalam konteks global, rezim kebijakan pendidikan juga banyak dipengaruhi oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, UNESCO, dan OECD, yang membawa agenda globalisasi pendidikan melalui konsep seperti human capital, standardized testing, dan school accountability. Konsep-konsep ini diterima oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari strategi pembangunan, padahal secara tersirat menanamkan logika pasar dan nilai-nilai neoliberalisme dalam sistem pendidikan<sup>8</sup>. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang siapa yang diuntungkan dari kebijakan pendidikan, serta apakah kebijakan

---

<sup>2</sup> Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. New York: Routledge, hlm. 4–6.

<sup>3</sup> Suwarno. (2013). *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89–93.

<sup>4</sup> Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan Nasional: Dari Orde Lama sampai Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 65–68.

<sup>5</sup> Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo, hlm. 127–132.

<sup>6</sup> Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books, hlm. 98–99.

<sup>7</sup> Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers, hlm. 244–245.

<sup>8</sup> Mundy, K., et al. (2016). *The Handbook of Global Education Policy*. Hoboken: Wiley-Blackwell, hlm. 12–17.

tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat banyak, atau justru mereproduksi ketimpangan struktural yang sudah ada<sup>9</sup>.

Dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis politik dalam perumusan kebijakan pendidikan sebagai wujud kekuasaan dalam kebijakan publik. Fokus utama diarahkan pada identifikasi mekanisme kekuasaan, aktor-aktor dominan, serta bagaimana wacana dan ideologi dikonstruksi dan dilegitimasi dalam dokumen kebijakan pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah teori kritis, dengan memadukan analisis relasi kuasa-pengetahuan ala Foucault dan konsep hegemoni Gramsci sebagai kerangka analitik untuk membaca kebijakan sebagai medan kontestasi ideologis. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami pendidikan sebagai arena politik yang memerlukan pembacaan kritis, partisipatif, dan transformatif.

## TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini menyajikan konstruksi konseptual dan kerangka teoritik yang menjadi dasar dalam menganalisis keterkaitan antara politik, kebijakan pendidikan, dan kekuasaan dalam konteks kebijakan publik. Kajian ini diorganisasi ke dalam empat subbagian: (1) paradigma politik dalam kebijakan publik, (2) pendidikan sebagai medan kekuasaan, (3) hegemoni dalam kebijakan pendidikan, serta (4) globalisasi dan kolonisasi kebijakan pendidikan.

### Paradigma Politik dalam Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan ekspresi dari pertarungan kepentingan berbagai aktor dalam ruang kekuasaan. Lasswell mendefinisikan kebijakan publik sebagai “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana,” yang secara eksplisit menunjukkan bahwa kebijakan merupakan hasil negosiasi dan dominasi dalam sistem politik<sup>10</sup>. Dalam konteks ini, pendidikan bukan sekadar urusan teknokratis atau administratif, melainkan isu strategis yang sangat politis karena berkaitan dengan pembentukan kesadaran kolektif dan reproduksi nilai ideologis.

Mazmanian dan Sabatier menambahkan bahwa kebijakan tidak semata ditentukan oleh naskah regulasi, tetapi juga oleh konteks implementasi, struktur kekuasaan, serta dinamika hubungan antaraktor<sup>11</sup>. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pendidikan harus dipahami dalam lanskap politik yang lebih luas, termasuk relasi antara negara, masyarakat sipil, elit politik, dan institusi internasional.

---

<sup>9</sup> Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum*. New York: RoutledgeFalmer, hlm. 19–21.

<sup>10</sup> Lasswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. Stanford: Stanford University Press, hlm. 3–4.

<sup>11</sup> Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott Foresman, hlm. 21–23.

### **Pendidikan sebagai Medan Kekuasaan: Perspektif Foucault**

Michel Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak bekerja hanya melalui represif formal, tetapi justru melalui mekanisme yang halus dan tersembunyi, seperti institusi pendidikan, bahasa, wacana, dan pengetahuan<sup>12</sup>. Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menggambarkan bagaimana sekolah menjadi institusi yang memproduksi “tubuh yang patuh” melalui disiplin, penilaian, dan klasifikasi<sup>13</sup>. Dalam kerangka ini, kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pendisiplinan sosial dan reproduksi ideologi melalui praktik administratif dan kurikuler.

Foucault juga memperkenalkan konsep *power/knowledge*, yakni bahwa pengetahuan tidak pernah netral, tetapi selalu berkelindan dengan kekuasaan. Pendidikan menjadi saluran dominan di mana pengetahuan dikonstruksi, disebarluaskan, dan dilegitimasi sesuai dengan kepentingan kekuasaan hegemonik<sup>14</sup>. Hal ini menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis dalam konstruksi identitas nasional dan kontrol sosial dalam kerangka kebijakan publik.

### **Hegemoni dan Pendidikan: Pandangan Gramsci**

Antonio Gramsci memperluas pemahaman kekuasaan dengan mengusulkan konsep hegemoni, yaitu dominasi ideologis yang berlangsung melalui persetujuan sosial (*consent*) ketimbang pemaksaan (*coercion*)<sup>15</sup>. Dalam pandangan Gramsci, institusi pendidikan merupakan alat negara dalam membangun *common sense* yang mendukung struktur kekuasaan dominan. Pendidikan bukan hanya mentransmisikan ilmu, melainkan juga membentuk pola pikir, nilai, dan sikap politik masyarakat agar selaras dengan tatanan hegemonik.

Implikasi dari teori Gramsci adalah bahwa kebijakan pendidikan tidak pernah bebas dari nilai ideologis dan kepentingan politik. Dominasi kelas penguasa direproduksi melalui kurikulum, pengaturan bahasa, narasi sejarah, dan struktur kelembagaan pendidikan<sup>16</sup>. Dalam konteks Indonesia, hal ini tampak dalam bagaimana negara menggunakan pendidikan untuk membentuk nasionalisme, loyalitas politik, bahkan dukungan terhadap pembangunan ekonomi versi negara.

### **Globalisasi dan Kolonialisasi Kebijakan Pendidikan**

Literatur kontemporer juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan saat ini tidak hanya ditentukan oleh politik domestik, tetapi juga oleh agenda global yang dibawa oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, OECD, dan UNESCO. Rizvi dan Lingard mengemukakan bahwa globalisasi telah mendorong negara-negara berkembang mengadopsi kebijakan pendidikan berbasis kompetensi,

---

<sup>12</sup> Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books, hlm. 81-85.

<sup>13</sup> Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, hlm. 170-177.

<sup>14</sup> Ball, S. J. (2012). *Foucault, Power, and Education*. New York: Routledge, hlm. 29-31.

<sup>15</sup> Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers, hlm. 244-248.

<sup>16</sup> Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum*. New York: RoutledgeFalmer, hlm. 31-34.

evaluasi berbasis standar, serta orientasi pasar<sup>17</sup>. Fenomena ini disebut sebagai policy borrowing and lending, yakni adopsi kebijakan luar negeri yang seringkali tidak kontekstual.

Dalam kerangka ini, terjadi apa yang disebut oleh Carnoy sebagai kolonisasi kebijakan pendidikan, di mana negara-negara Dunia Ketiga terjebak dalam logika neoliberalisme dan efisiensi, sehingga mengabaikan dimensi keadilan sosial dan lokalitas kebudayaan<sup>18</sup>. Dalam konteks Indonesia, berbagai kebijakan seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum 2013, dan Merdeka Belajar mengandung unsur kuat pengaruh internasional yang tidak selalu kompatibel dengan realitas lokal.

## KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam proses perumusan kebijakan pendidikan, serta bagaimana kebijakan tersebut menjadi sarana reproduksi ideologi dalam masyarakat. Pendekatan teoritik yang digunakan bersifat interdisipliner, dengan menggabungkan teori kekuasaan Michel Foucault, teori hegemoni Antonio Gramsci, dan teori kebijakan publik Harold Lasswell, guna membongkar dinamika antara aktor politik, struktur institusional, serta wacana ideologis dalam kebijakan pendidikan.

### Teori Kekuasaan: Michel Foucault

Konsep kekuasaan dalam perspektif Foucault tidak dipahami secara konvensional sebagai milik institusi atau individu, melainkan sebagai sesuatu yang tersebar dalam jaringan sosial dan terinternalisasi dalam praktik sehari-hari<sup>19</sup>. Foucault menyatakan bahwa kekuasaan bekerja secara produktif, membentuk subjek, serta menciptakan norma-norma kebenaran melalui mekanisme disiplin, wacana, dan pengawasan<sup>20</sup>. Dalam konteks kebijakan pendidikan, kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk keputusan administratif, tetapi juga melalui:

- a) Kurikulum dan standar nasional sebagai instrumen pembentukan pengetahuan sah (regimes of truth);
- b) Evaluasi dan asesmen sebagai mekanisme normalisasi dan kontrol;
- c) Peran negara dan institusi pendidikan sebagai aktor pembentuk subjek warga negara yang taat dan produktif.

Dengan demikian, teori Foucault memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan membentuk identitas politik masyarakat melalui disiplin simbolik dan representasi wacana<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. New York: Routledge, hlm. 39-44.

<sup>18</sup> Carnoy, M. (1999). *Globalization and Educational Reform: What Planners Need to Know*. Paris: UNESCO/IIEP, hlm. 6-8.

<sup>19</sup> Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books, hlm. 92-95.

<sup>20</sup> Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, hlm. 170-177.

<sup>21</sup> Ball, S. J. (2012). *Foucault, Power, and Education*. New York: Routledge, hlm. 30-34.

### **Teori Hegemoni: Antonio Gramsci**

Gramsci memandang kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan (coercion), tetapi juga melalui penciptaan konsensus (consent) yang dibentuk oleh lembaga-lembaga ideologis seperti sekolah, media, dan agama<sup>22</sup>. Dalam konteks kebijakan pendidikan, teori hegemoni menjelaskan bahwa kebijakan disusun untuk melegitimasi dominasi kelas tertentu melalui kurikulum, bahasa, dan nilai-nilai yang dianggap netral tetapi sejatinya ideologis<sup>23</sup>.

Gramsci menyebut lembaga pendidikan sebagai bagian dari “civil society” yang berfungsi mempertahankan struktur hegemonik negara kapitalis. Sekolah bukan hanya tempat transmisi ilmu, tetapi juga arena pembentukan common sense, yakni pandangan dunia yang dianggap wajar oleh masyarakat karena terus direproduksi melalui sistem pendidikan<sup>24</sup>.

### **Teori Kebijakan Publik: Harold D. Lasswell**

Lasswell memformulasikan pendekatan kebijakan publik sebagai analisis tentang “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”<sup>25</sup>. Ia menekankan bahwa kebijakan publik adalah hasil interaksi antara aktor dengan kepentingan berbeda dalam ruang politik dan institusi. Dalam pendekatan ini, kebijakan pendidikan bukan hasil proses teknokratik netral, melainkan:

- a) Produk dari negosiasi dan kompromi antar aktor politik, birokrat, pengusaha, dan masyarakat sipil;
- b) Refleksi dari distribusi kekuasaan dan ideologi dominan yang sedang berlaku;
- c) Instrumen strategis untuk membentuk struktur sosial yang mendukung stabilitas politik dan ekonomi tertentu.

Kerangka ini memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana keputusan-keputusan pendidikan diambil, siapa yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut, dan bagaimana kekuasaan dimanifestasikan dalam praktik kebijakan.

### **Sintesis Teoritis**

Ketiga teori ini digunakan secara komplementer dalam penelitian ini:

1. Foucault berkontribusi dalam melihat dimensi mikro-kekuasaan dalam kebijakan pendidikan melalui praktik wacana, disiplin, dan pembentukan subjek.
2. Gramsci menyumbang perspektif makro-hegemonik, dengan menyoroti relasi kelas, dominasi ideologi, dan peran pendidikan dalam konsolidasi kekuasaan negara.

---

<sup>22</sup> Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers, hlm. 244–248.

<sup>23</sup> Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum*. New York: RoutledgeFalmer, hlm. 31–38.

<sup>24</sup> Giroux, H. A. (1983). *Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition*. South Hadley: Bergin & Garvey, hlm. 108–112.

<sup>25</sup> Lasswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. Stanford: Stanford University Press, hlm. 3–4.

3. Lasswell memberikan kerangka analisis praktis terhadap dinamika kebijakan, meliputi aktor, proses, dan hasil kebijakan sebagai bagian dari strategi politik.

Dengan demikian, kerangka teori ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan kebijakan pendidikan sebagai hasil formal dari regulasi negara, tetapi juga sebagai produk kekuasaan yang kompleks dan sarat ideologi dalam arena kebijakan publik.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan erat dengan kekuasaan, ideologi, dan proses konstruksi sosial dalam kebijakan pendidikan. Pendekatan kualitatif kritis memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna-makna tersembunyi di balik kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan serta mereproduksi relasi kekuasaan<sup>26</sup>.

Pendekatan ini juga menempatkan kebijakan bukan hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai produk sosial yang dibentuk oleh ideologi, kepentingan, dan praktik diskursif dalam arena politik dan institusi pendidikan<sup>27</sup>.

### Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka mendalam terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, yang meliputi:

- a. Dokumen kebijakan pendidikan di Indonesia, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan, Kurikulum Nasional, serta kebijakan "Merdeka Belajar".
- b. Literatur ilmiah dari jurnal internasional dan nasional, buku-buku teoretik dan empiris tentang kebijakan publik, teori kekuasaan, pendidikan kritis, dan globalisasi pendidikan.
- c. Laporan lembaga internasional (UNESCO, OECD, World Bank) terkait arah dan pengaruh kebijakan pendidikan global.
- d. Pidato, pernyataan resmi, dan narasi publik dari aktor negara (Presiden, Menteri Pendidikan, dan tokoh kebijakan).

Metode ini sejalan dengan model *documentary analysis*, di mana teks dianggap sebagai arena produksi makna yang harus dikaji secara kontekstual dan kritis<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications, hlm. 25–29.

<sup>27</sup> Yanow, D. (2000). *Conducting Interpretive Policy Analysis*. Thousand Oaks: Sage, hlm. 10–15.

<sup>28</sup> Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal*, 9(2), hlm. 27–40.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis wacana kritis (AWK) dengan merujuk pada model Norman Fairclough, yang terdiri dari tiga dimensi utama<sup>29</sup>:

1. Teks: Menganalisis struktur bahasa, diksi, metafora, dan narasi dalam dokumen kebijakan pendidikan.
2. Praktik Diskursif: Mengkaji bagaimana kebijakan diproduksi, disirkulasikan, dan diterima oleh aktor-aktor sosial.
3. Konteks Sosial: Menelaah bagaimana kebijakan terkait dengan struktur kekuasaan, ideologi dominan, dan praktik politik tertentu.

Analisis ini memungkinkan pengungkapan lapisan-lapisan kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi di balik konstruksi kebijakan pendidikan.

### Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif kritis, validitas data bukan ditentukan oleh replikasi kuantitatif, melainkan oleh kredibilitas argumen, konsistensi analisis, dan kedalaman interpretasi<sup>30</sup>. Untuk memastikan validitas, penelitian ini menerapkan:

1. Triangulasi sumber, yaitu penggunaan beragam referensi dari dokumen resmi, teori akademik, dan analisis media.
2. Konfirmasi teori, yaitu mencocokkan hasil temuan dengan kerangka teori yang digunakan (Foucault, Gramsci, dan Lasswell).
3. Audit trail, yaitu dokumentasi sistematis terhadap semua proses pengumpulan dan analisis data.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Karena bersifat studi pustaka, lokasi penelitian mencakup ruang teks dan diskursus kebijakan nasional, dengan fokus pada Indonesia. Waktu penelitian berlangsung selama Desember 2024 hingga Mei 2025, mencakup proses pengumpulan dokumen, pembacaan kritis, dan penyusunan analisis.

## ANALISIS

### Politik, Kekuasaan, Dan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia

#### 1. Kebijakan Pendidikan sebagai Arena Politik

Kebijakan pendidikan di Indonesia dapat dipahami sebagai arena politik yang dipengaruhi oleh berbagai aktor, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan teori kebijakan publik Harold Lasswell, kebijakan pendidikan tidak pernah bersifat netral; ia selalu mencerminkan distribusi kekuasaan dan kepentingan dari berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan<sup>31</sup>. Pemerintah Indonesia, sebagai aktor dominan dalam pembentukan kebijakan pendidikan, memiliki kontrol utama dalam menetapkan agenda pendidikan nasional, seperti yang

---

<sup>29</sup> Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman, hlm. 58-59.

<sup>30</sup> Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage, hlm. 290-294.

<sup>31</sup> Lasswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. Stanford: Stanford University Press, hlm. 3-4.

tercermin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan kebijakan-kebijakan teknis lainnya.

Namun, pengaruh aktor luar, seperti lembaga internasional (UNESCO, World Bank, OECD) yang mempromosikan standar internasional dalam pendidikan, semakin kuat. Pengaruh ini menambah dimensi global pada kebijakan pendidikan nasional. Misalnya, kebijakan Kurikulum 2013 dan konsep Merdeka Belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial politik domestik, tetapi juga oleh tren global dalam pendidikan yang mendorong efisiensi, standar kompetensi, dan pengukuran berbasis hasil<sup>32</sup>.

## 2. Kekuasaan dan Pendidikan: Pandangan Foucault dalam Kebijakan Pendidikan

Dari perspektif Foucault, kebijakan pendidikan adalah salah satu alat utama dalam "membentuk tubuh yang patuh" dan membangun subjek-subjek yang terstruktur sesuai dengan kepentingan negara. Foucault berargumen bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui struktur formal, tetapi juga dalam bentuk disiplin yang lebih halus, seperti kurikulum, evaluasi, dan pengawasan sosial<sup>33</sup>. Dalam kebijakan pendidikan Indonesia, proses ini tercermin dalam penggunaan standar kompetensi dan evaluasi berbasis hasil, yang menurut Foucault berfungsi untuk mengontrol dan mengarahkan perilaku siswa dan guru.

Penerapan kurikulum yang menekankan pada penilaian standar mengimplikasikan proses normalisasi, di mana siswa dan guru dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh kebijakan yang bersifat teknokratis dan objektif, padahal pada kenyataannya, standar ini sering kali tidak mencerminkan realitas sosial yang ada di lapangan<sup>34</sup>. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mendistribusikan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam mendisiplinkan individu agar sesuai dengan norma yang ditetapkan negara.

## 3. Hegemoni dalam Kebijakan Pendidikan: Perspektif Gramsci

Gramsci menawarkan perspektif yang lebih luas dengan menyoroti peran hegemoni dalam kebijakan pendidikan. Hegemoni, dalam pandangan Gramsci, merupakan suatu bentuk dominasi yang tidak hanya dijalankan melalui paksaan, tetapi juga melalui persetujuan yang diperoleh dari masyarakat secara keseluruhan<sup>35</sup>. Dalam konteks kebijakan pendidikan Indonesia, hegemoni ini bekerja melalui kurikulum, pengajaran sejarah, serta pembentukan identitas nasional.

Kebijakan pendidikan Indonesia seringkali mencerminkan kepentingan politik tertentu yang bertujuan untuk menciptakan konsensus nasional. Misalnya, pengajaran sejarah yang menekankan pada pembentukan nasionalisme dan identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia, serta upaya untuk memperkuat legitimasi pemerintahan yang ada. Kurikulum pendidikan yang menggambarkan "visi besar"

---

<sup>32</sup> Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. New York: Routledge, hlm. 39-44.

<sup>33</sup> Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, hlm. 170-177.

<sup>34</sup> Ball, S. J. (2012). *Foucault, Power, and Education*. New York: Routledge, hlm. 29-31.

<sup>35</sup> Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers, hlm. 244-248.

negara dalam pembangunan ekonomi dan sosial juga merupakan bentuk dari dominasi ideologis yang dilakukan melalui lembaga pendidikan.

#### 4. Globalisasi dan Kolonialisasi Kebijakan Pendidikan

Salah satu dinamika penting dalam kebijakan pendidikan di Indonesia adalah pengaruh globalisasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rizvi dan Lingard, kebijakan pendidikan di negara berkembang seperti Indonesia sering kali dipengaruhi oleh arus kebijakan pendidikan internasional yang cenderung mengarah pada standarisasi dan kompetisi internasional<sup>36</sup>. Hal ini terlihat dalam kebijakan yang mengadopsi kurikulum berbasis kompetensi dan pengukuran hasil belajar yang objektif dan terstandar.

Namun, pengaruh global ini sering kali membawa konsekuensi kolonialisasi kebijakan, di mana kebijakan pendidikan negara-negara berkembang disesuaikan dengan standar internasional yang belum tentu sesuai dengan konteks lokal. Hal ini dapat dilihat dalam implementasi Kurikulum 2013 yang dipengaruhi oleh trend pendidikan global, meskipun beberapa komponen tersebut tidak sepenuhnya cocok dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Keberlanjutan kebijakan seperti ini menunjukkan betapa besar kekuatan lembaga internasional dalam membentuk kebijakan nasional dan menggiringnya menuju pola-pola kebijakan yang terstandarisasi secara global.

#### 5. Kebijakan Pendidikan sebagai Sarana Reproduksi Kekuasaan

Melalui lensa Foucault dan Gramsci, kebijakan pendidikan dapat dipandang sebagai sarana penting dalam reproduksi kekuasaan. Negara tidak hanya menggunakan pendidikan untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi dengan membentuk subjek yang tunduk pada norma dan ideologi dominan<sup>37</sup>. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai alat ideologis yang kuat dalam melanggengkan struktur sosial yang ada, dengan menghasilkan individu-individu yang memiliki kesadaran yang sesuai dengan tatanan sosial yang ada.

Hal ini tercermin dalam kebijakan Merdeka Belajar, yang meskipun memiliki niat untuk memberi kebebasan lebih pada siswa dan guru, tetap berada dalam kerangka pengawasan yang ketat melalui sistem evaluasi berbasis standar dan sistematika pengajaran yang tidak sepenuhnya memberikan ruang bagi kreativitas dan otonomi pendidikan lokal. Dengan kata lain, meskipun ada kesan adanya pembebasan dalam kebijakan tersebut, kekuasaan negara tetap bekerja untuk mengatur dan mengontrol arah pendidikan di Indonesia.

---

<sup>36</sup> Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. New York: Routledge, hlm. 39–44.

<sup>37</sup> Giroux, H. A. (1983). *Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition*. South Hadley: Bergin & Garvey, hlm. 108–112.

## PEMBAHASAN

### Kekuasaan, Ideologi, Dan Politik Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia

#### 1. Kebijakan Pendidikan sebagai Instrumen Kekuasaan Negara

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kebijakan pendidikan Indonesia, termasuk Kurikulum 2013 dan kebijakan Merdeka Belajar, berfungsi sebagai instrumen kekuasaan negara yang digunakan untuk membentuk dan mengontrol subjek yang mematuhi norma-norma sosial dan ideologi dominan. Menggunakan teori Michel Foucault, kebijakan pendidikan bisa dilihat sebagai alat negara untuk mengatur dan mendisiplinkan individu melalui mekanisme pengawasan yang tidak terlihat<sup>38</sup>. Dalam hal ini, kekuasaan yang dimaksud bukan hanya kekuasaan politik yang terlihat, melainkan juga kekuasaan yang tersebar dalam praktek pendidikan, seperti kurikulum, evaluasi, dan standar kompetensi yang mengarahkan perilaku individu<sup>39</sup>.

Implementasi praktis dari kebijakan Merdeka Belajar dan Kurikulum 2013 menunjukkan adanya upaya negara untuk menciptakan individu yang patuh dan produktif. Namun, meskipun kebijakan ini memberi kebebasan bagi siswa dalam memilih jalur pendidikan, ia tetap terstruktur dalam sistem evaluasi berbasis kompetensi yang diukur secara objektif. Dalam konteks ini, Foucault melihat bahwa meskipun ada kesan kebebasan, kebijakan tersebut masih tetap berfungsi sebagai alat kontrol, di mana norma dan standar pendidikan yang diatur oleh negara mempengaruhi dan mengarahkan perilaku individu<sup>1</sup>. Sebagai contoh, kurikulum yang berbasis pada penilaian hasil dan kompetensi menjadi alat untuk menstandarisasi pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan pemerintah<sup>40</sup>.

#### 2. Hegemoni dalam Kebijakan Pendidikan: Ideologi Negara dan Konsensus Sosial

Pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegemoni dapat memperjelas lebih lanjut tentang fungsi ideologi dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Melalui pendidikan, negara berusaha menciptakan konsensus sosial yang mendukung tatanan sosial yang ada. Salah satu contohnya adalah kebijakan pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai kebangsaan dan pembentukan identitas nasional. Pendidikan di Indonesia, dalam hal ini, berfungsi untuk memperkuat ideologi dominan dan memasyarakatkan nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan kekuasaan politik dan sosial.

Misalnya, kebijakan Merdeka Belajar, meskipun memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih jalur pendidikan yang lebih sesuai dengan minat dan bakat, tetap mempertahankan standar kompetensi yang mendasari evaluasi dan pengukuran hasil. Gramsci menyebut ini sebagai hegemoni pasif<sup>41</sup>, di mana meskipun kebijakan tersebut tampak seperti memberikan kebebasan, ia tetap mematuhi ideologi yang lebih luas yang

---

<sup>38</sup> Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995), 197–228.

<sup>39</sup> Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 131–133.

<sup>40</sup> Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, ed. and trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), 12–19.

<sup>41</sup> Bob Jessop, "The State and the Contradictions of the Knowledge-Driven Economy," dalam *Changing Modes of Economic and Political Governance*, ed. Jeffrey Henderson dan Richard P. Appelbaum (Cheltenham: Edward Elgar, 2005), 57–76.

dipengaruhi oleh kepentingan pasar dan penguasa politik. Kebijakan ini tidak hanya membentuk individu untuk menjadi produktif, tetapi juga untuk membentuk mereka sesuai dengan ideologi yang mendukung sistem sosial yang ada, misalnya dengan menanamkan nilai-nilai seperti nasionalisme dan kewajiban kolektif<sup>42</sup>.

### 3. Pengaruh Globalisasi dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia

Dalam era globalisasi, kebijakan pendidikan Indonesia tidak lepas dari pengaruh standar internasional yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO, Bank Dunia, dan OECD. Pengaruh global ini mendorong negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi kebijakan pendidikan berbasis kompetensi yang terstandarisasi secara internasional<sup>43</sup>, sebagaimana tercermin dalam kebijakan Kurikulum 2013. Lembaga-lembaga internasional ini sering kali mendorong negara-negara untuk mengejar efisiensi pendidikan dan peningkatan daya saing internasional melalui penilaian berbasis standar yang mengukur kemampuan individu dalam konteks global.

Namun, pengaruh ini juga membawa dampak yang signifikan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rizvi dan Lingard, kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh standar internasional sering kali tidak sepenuhnya memperhitungkan konteks lokal<sup>44</sup>. Di Indonesia, misalnya, kebijakan Kurikulum 2013 yang mengharuskan evaluasi berbasis hasil dan kompetensi sering kali tidak memperhatikan perbedaan kebutuhan sosial dan ekonomi di berbagai daerah. Daerah-daerah yang lebih terpencil dan kurang berkembang menghadapi kesulitan dalam menerapkan standar global ini, karena mereka tidak memiliki sumber daya atau infrastruktur yang memadai.

Sebagai contoh, di beberapa daerah pedesaan, implementasi kebijakan ini mengalami penurunan kualitas pendidikan akibat ketidakmampuan sekolah dalam memenuhi standar yang ditetapkan<sup>45</sup>. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan pendidikan yang semakin lebar antara daerah maju dan tertinggal.

### 4. Kontestasi Politik dan Ekonomi dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Selain pengaruh global, kontestasi politik dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan sering kali tidak terlepas dari lobi-lobi politik yang dilakukan oleh partai politik, kelompok bisnis, dan organisasi masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan-kebijakan yang mengarah pada privatisasi pendidikan dan penguatan sektor swasta dalam dunia pendidikan mencerminkan adanya pengaruh kuat dari kapitalisme global yang mendorong sektor pendidikan untuk menjadi lebih berorientasi pada pasar<sup>9</sup>.

Kebijakan seperti sertifikasi guru dan penerapan standar kompetensi yang ketat dapat dianggap sebagai upaya untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai dengan kebutuhan pasar, meskipun sering kali hal ini mengabaikan kebutuhan

---

<sup>42</sup> Fazal Rizvi and Bob Lingard, *Globalizing Education Policy* (London: Routledge, 2010), 22–45.

<sup>43</sup> Suyanto, "Kebijakan Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Global," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 4 (2012): 397–409.

<sup>44</sup> Darmaningtyas, "Privatisasi Pendidikan: Ancaman terhadap Hak Pendidikan Rakyat," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 14, No. 3 (2008): 258–270.

<sup>45</sup> Ery Seda, "Politik Pendidikan dan Ketimpangan Sosial," dalam *Pendidikan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia*, ed. Wardiman Djojonegoro (Jakarta: LP3ES, 2013), 89–102.

kesejahteraan sosial dan keseimbangan dalam pengembangan potensi siswa. Selain itu, politisasi anggaran pendidikan juga seringkali terjadi, di mana anggaran pendidikan lebih diprioritaskan untuk kepentingan politik tertentu daripada untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia<sup>46</sup>.

#### 5. Kebijakan Pendidikan sebagai Reproduksi Kekuasaan Sosial

Sebagai alat reproduksi kekuasaan, kebijakan pendidikan di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk mereproduksi struktur sosial yang ada. Negara menggunakan kebijakan pendidikan sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial dan politik, serta untuk memastikan bahwa norma dan nilai yang ada tetap dipatuhi oleh generasi-generasi mendatang<sup>10</sup>. Pendidikan menjadi sarana untuk memastikan bahwa individu-individu yang dilahirkan dari sistem pendidikan akan memiliki kesadaran yang sesuai dengan tatanan sosial yang ada, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan kekuasaan politik yang berlaku.

Pendidikan menjadi alat untuk menciptakan konsensus sosial, di mana individu-individu belajar untuk menerima dan mendukung struktur sosial yang ada, meskipun mungkin ada ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi kerja sering kali berorientasi pada pembentukan individu yang siap bersaing di pasar global, tetapi pada saat yang sama, kebijakan ini tidak memadai untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

### KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia berfungsi sebagai instrumen penting dalam reproduksi kekuasaan sosial, dengan peran utama dalam membentuk individu yang sesuai dengan kebutuhan politik, ekonomi, dan sosial yang lebih besar. Berdasarkan analisis teori Michel Foucault dan Antonio Gramsci, kebijakan pendidikan, meskipun terlihat memberi kebebasan dalam beberapa aspek, tetap dipengaruhi oleh kekuasaan negara yang mengarah pada penciptaan konsensus sosial yang mendukung ideologi dominan. Kebijakan seperti Kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar menunjukkan bagaimana negara menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu melalui mekanisme pengawasan dan penilaian berbasis kompetensi yang lebih mengutamakan standar internasional dan orientasi pasar. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak sepenuhnya memperhitungkan konteks sosial dan ekonomi lokal, terutama di daerah yang lebih terpencil dan kurang berkembang, yang menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif.

Kebijakan pendidikan Indonesia juga dipengaruhi oleh kontestasi politik dan kepentingan ekonomi, dengan lobi-lobi politik yang mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada pasar dan privatisasi pendidikan. Dalam banyak kasus, hal ini menambah ketimpangan sosial dan pendidikan, memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada, dan lebih menekankan pada persaingan global daripada keberlanjutan

---

<sup>46</sup> OECD, *Education Policy Outlook: Indonesia* (Paris: OECD Publishing, 2022), 14–28.

sosial yang adil dan merata. Dari perspektif globalisasi, kebijakan pendidikan Indonesia sering kali dipengaruhi oleh standar internasional yang dibawa oleh lembaga-lembaga global, seperti UNESCO dan Bank Dunia, yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan realitas sosial Indonesia.

Pendidikan juga berperan sebagai alat reproduksi ideologi, di mana melalui pendidikan, negara dan masyarakat mencoba untuk membentuk identitas dan kesadaran nasional yang sejalan dengan sistem nilai yang ada. Meskipun kebijakan pendidikan memberikan fleksibilitas dalam hal pilihan jalur pendidikan, hal ini tetap dikelola dalam struktur yang mempertahankan hegemoni ideologi yang lebih besar.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Indonesia berfungsi sebagai alat kekuasaan yang mereproduksi struktur sosial yang ada, sementara memperkuat dominasi ideologi dan membentuk individu yang siap untuk mendukung tatanan sosial dan ekonomi yang berlaku. Meskipun ada kebijakan yang mengedepankan fleksibilitas dan kebebasan, mereka tetap bekerja dalam kerangka kontrol dan disiplin yang pada akhirnya menghasilkan individu-individu yang diharapkan untuk menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas, tanpa banyak ruang untuk penolakan terhadap struktur dominan tersebut.

## SARAN

1. Pendekatan yang Lebih Inklusif dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan Sebagai langkah menuju perbaikan, kebijakan pendidikan perlu dirumuskan dengan pendekatan yang lebih inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan sosial dan konteks ekonomi lokal. Kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan keberagaman sosial dan kondisi geografis yang berbeda antara daerah maju dan tertinggal. Misalnya, kebijakan pendidikan yang mengutamakan standar internasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta memperhitungkan ketimpangan infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Perumusan Kebijakan Agar kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi alat kontrol oleh negara, penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Pemerintah dapat menciptakan platform partisipatif di mana masyarakat, terutama dari kalangan pendidikan dan orang tua, memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Ini akan memberikan legitimasi sosial yang lebih besar bagi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berpihak pada kepentingan kekuasaan atau ekonomi, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan sosial.
3. Mengurangi Pengaruh Politik dalam Penetapan Kebijakan Pendidikan Sebagai langkah untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik, sebaiknya dilakukan pemisahan yang jelas antara kebijakan pendidikan dan proses politik elektoral. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat independensi lembaga pendidikan dan menciptakan mekanisme transparansi dalam perumusan kebijakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan politik sesaat.

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan Memperhatikan Keadilan Sosial  
Kebijakan pendidikan harus lebih memperhatikan keadilan sosial dan pengurangan ketimpangan. Upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan harus dilaksanakan dengan mengutamakan peningkatan akses dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah yang lebih terpencil. Dalam hal ini, perhatian lebih besar harus diberikan pada peningkatan kualitas pengajaran dan fasilitas di daerah-daerah yang masih tertinggal.
5. Fokus pada Pembentukan Karakter yang Berbasis pada Nilai Sosial dan Moral  
Pendidikan di Indonesia perlu lebih fokus pada pembentukan karakter yang mencakup nilai sosial dan moral. Kebijakan pendidikan sebaiknya mengintegrasikan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Pembentukan karakter ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.
6. Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan Secara Berkala  
Sebagai bagian dari sistem pendidikan yang dinamis, penting bagi kebijakan pendidikan untuk selalu dievaluasi dan diperbaiki secara berkala. Evaluasi ini harus berbasis pada data empiris dan melibatkan penilaian dampak kebijakan terhadap keberhasilan pendidikan, kesetaraan akses, dan pengurangan ketimpangan. Dengan evaluasi yang terus-menerus, kebijakan pendidikan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

## **PENUTUP**

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan di Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan individu yang tidak hanya siap untuk bersaing di pasar global, tetapi juga yang dapat mendukung sistem sosial yang ada. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat, keadilan sosial, dan penerapan prinsip-prinsip demokratis dalam setiap tahapan perumusan kebijakan. Agar kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi alat kontrol, namun juga alat untuk pemberdayaan sosial, maka perbaikan dan evaluasi yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi yang ada.

Berikut adalah Daftar Pustaka yang relevan untuk mendukung keseluruhan pembahasan dalam jurnal ini. Daftar pustaka ini mencakup berbagai sumber yang terkait dengan teori pendidikan, kebijakan publik, kekuasaan, serta pengaruh globalisasi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, ed. and trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), 12–19.
- Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum* (3rd ed.). New York: RoutledgeFalmer.
- Apple, M. W., & Beane, J. A. (2007). *Democratic Schools: Lessons in Powerful*

- Education. Portsmouth: Heinemann.
- Ball, S. J. (1994). *Education Reform: A Critical and Post-structural Approach*.
- Bank Dunia. (2014). *Indonesia: Pendidikan untuk Semua (Education for All)*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Bob Jessop, "The State and the Contradictions of the Knowledge-Driven Economy," dalam *Changing Modes of Economic and Political Governance*, ed. Jeffrey Henderson dan Richard P. Appelbaum (Cheltenham: Edward Elgar, 2005), 57-76.
- Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal*, 9(2), hlm. 27-40.
- Carnoy, M. (1999). *Globalization and Educational Reform: What Planners Need to Know*. Paris: UNESCO/IIEP, hlm. 6-8.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications, hlm. 25-29.
- Darmaningtyas, "Privatisasi Pendidikan: Ancaman terhadap Hak Pendidikan Rakyat," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 14, No. 3 (2008): 258-270.
- Ery Seda, "Politik Pendidikan dan Ketimpangan Sosial," dalam *Pendidikan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia*, ed. Wardiman Djojonegoro (Jakarta: LP3ES, 2013), 89-102.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman, hlm. 58-59.
- Fazal Rizvi and Bob Lingard, *Globalizing Education Policy* (London: Routledge, 2010), 22-45.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, hlm. 170-177.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books, hlm. 98-99.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books, hlm. 81-85.
- Giroux, H. A. (1983). *Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition*. South Hadley: Bergin & Garvey.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Standar Proses Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Lasswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. Stanford: Stanford University Press, hlm. 3-4.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage, hlm. 290-294.
- Lingard, B., & Sellar, S. (2013). *The Global Education Race: Taking the Measure of PISA and International Testing*. New York: Teachers College Press
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott Foresman, hlm. 21-23.

- Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995), 197–228.
- Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 131–133.
- Muhammad Rahman Syah Putra, Aldi Maulana, Hafizorrahman, & Marshanda Putri. (2025). Digital Literacy and Active Citizenship: Strengthening Participatory Democracy on Social Media. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(2), 156–170. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.29>
- Mundy, K., et al. (2016). *The Handbook of Global Education Policy*. Hoboken: Wiley-Blackwell, hlm. 12–17.
- Nur Asyikin, Wulan Rafelia, & Ika Kurnia Sofiani. (2025). The Role Of Technology In Equitable Education: Policy Analysis And Implementation Challenges In Indonesia. *Public Service: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.61166/service.v2i1.6>
- OECD, *Education Policy Outlook: Indonesia* (Paris: OECD Publishing, 2022), 14–28.
- Ozga, J. (2000). *Policy, Politics, and the New Educational Governance*. London: Routledge
- Rizvi, F. (2005). Internationalization and Education Policy: Theories, History, and Politics. *Journal of Education Policy*, 20(3), 249–266
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. New York: Routledge.
- Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan Nasional: Dari Orde Lama sampai Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 65–68.
- Suharto, S. (2018). *Pendidikan Nasional dalam Perspektif Pembangunan dan Globalisasi*. Jakarta: Kencana.
- Suwarno. (2013). *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89–93.
- Suyanto, “Kebijakan Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Global,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 4 (2012): 397–409.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo, hlm. 127–132.
- Torres, C. A. (2002). Globalization, Education, and the State: Changing Discourses and Contexts. *International Journal of Comparative Sociology*, 43(2), 116–134.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yanow, D. (2000). *Conducting Interpretive Policy Analysis*. Thousand Oaks: Sage, hlm. 10–15.